



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BALI TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Sesanti Angayubagia kami haturkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, sehingga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2025 dapat disusun, dengan berpedoman pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025.

Semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini dapat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

Bali, 30 Juni 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BALI,



Dr. I KETUT SUKRA NEGARA, S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19681129 198903 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I	PENDAHULUAN
	1
1.1.	Latar Belakang
	1
1.2.	Landasan Hukum
	4
1.3.	Maksud dan Tujuan
	6
1.4.	Sistematika Penulisan
	7
Bab II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
	TAHUN BERKENAAN
	8
Bab III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
	DAERAH
	16
Bab IV	PENUTUP
	24

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu instrumen yang sangat strategis dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan kapasitas fiskal pemerintah untuk berinvestasi, oleh karenanya peran serta pihak swasta maupun asing sangat diperlukan.

Pelaksanaan penanaman modal dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah ketersediaan potensi sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal. Iklim penanaman modal yang kondusif akan menjadi ladang yang subur bagi tumbuh kembangnya investasi di suatu daerah.

Oleh karenanya kebijakan pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan menjadi penentu minat penanam modal karena para penanam modal menginginkan adanya kepastian hukum dan jaminan keamanan terhadap modal yang diinvestasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Untuk itu Pemerintah Provinsi Bali dalam menarik partisipasi para penanam modal nasional maupun asing untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah Bali telah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi UMKM, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Bali.

Untuk meningkatkan nilai tambah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali telah melakukan berbagai upaya seperti :

1. Membangun sinergitas promosi investasi dengan Kabupaten/Kota se-Bali untuk menyiapkan bahan promosi yang terintegrasi.
2. Melakukan pendekatan melalui surat ke Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI agar event-event promosi investasi lebih banyak bisa diselenggarakan di Provinsi Bali.
3. Memanfaatkan fasilitas jendela promosi penanaman modal, melaksanakan kajian potensi investasi dengan pihak ketiga yaitu pembuatan video berbasis Informasi dan Teknologi (IT) dengan mengunggah peluang dan potensi investasi daerah pada sistem potensi investasi regional (PIR) yang dikelola oleh Direktorat Pengembangan Potensi Daerah pada Kementerian Investasi/BKPM RI dan INAACCES Kemenlu RI.
4. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali untuk dapat lebih sinergitas melakukan promosi baik nasional maupun internasional terhadap peluang dan potensi pariwisata lain yang ada di daerah.
5. Memberikan layanan konsultasi dan memberikan solusi kepada pelaku usaha terhadap permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan investasi.
6. Melakukan pembinaan dan evaluasi ke lapangan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penanam modal agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Memberikan stempel pada setiap produk perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan biaya Rp.0,- dan ditanda tangani secara elektronik (TTE) oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, sehingga izin yang dikeluarkan bersifat transparan dan akuntabel, serta tidak ada peluang terjadinya unsur KKN pada Sistem PRESTISE.
8. Penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik kepada pelaku usaha masyarakat bahwa dalam pengajuan permohonan izin dan non izin tidak dipungut biaya, pasti, cepat dan mudah bisa dilaksanakan darimana, kapan saja sepanjang ada internet serta tidak menggunakan calo.
9. Memberikan layanan pendampingan OSS (*Online Single Submission*) kepada pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam penginputan data.

10. Melakukan pelayanan keliling ke sembilan Kabupaten/Kota untuk penerbitan/penyelesaian Nomor Induk Berusaha, izin dan non izin.
11. Melakukan pengembangan aplikasi perizinan dan non perizinan (*prestise*).
12. Melakukan fasilitasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dengan menghadirkan narasumber secara langsung.
13. Penandatanganan Pakta Integritas oleh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
14. Tidak korupsi sesuai arahan yang ditetapkan, pemasangan CCTV, banner dan lain-lain di beberapa titik kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
15. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana Prasarana.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah.

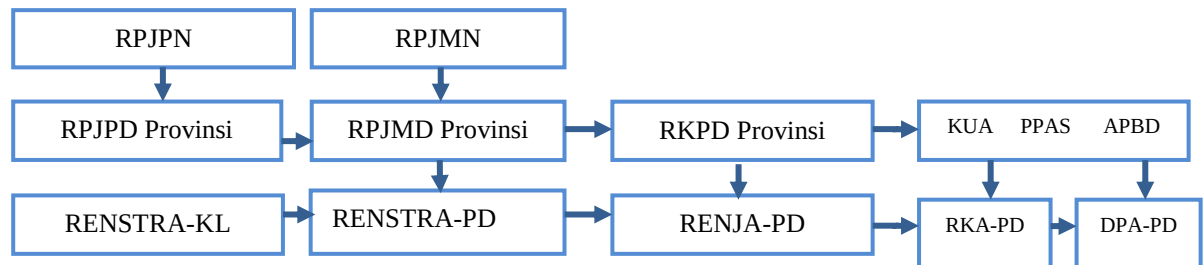
Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada dokumen perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan. Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Diagram 1.1

Hubungan Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan hukum

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2025 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7);

- 13) Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25).

1.3 Maksud dan Tujuan.

Perubahan Renja Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjadi acuan/pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dalam menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
2. Mewujudkan konsistensi, sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I diuraikan hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, Dasar Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan gubernur dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Pada Maksud dan Tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan rancangan perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Sistematika Penulisan Rancangan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Pada Bab ini diuraikan tentang Hasil Evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 meliputi capaian kinerja dan keuangan, kendala yang dihadapi serta solusi yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab III ini diuraikan tentang matrik perubahan rencana kerja dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab IV ini diuraikan antara lain catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun dari ketersediaan anggaran yang tidak sesuai kebutuhan serta kaidah-kaidah pelaksanaan perubahan renja.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

TAHUN BERKENAAN

Dalam BAB II Tentang Hasil Evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 meliputi capaian kinerja dan keuangan, kendala yang dihadapi serta solusi yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut. Evaluasi dilaksanakan pada dasarnya untuk menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya evaluasi dilaksanakan dengan melihat realisasi pencapaian target fisik kegiatan, penyerapan dana, kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sampai dengan Triwulan I pada tahun 2025 secara keseluruhan realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dari total 6 program sudah tercapai target sampai dengan triwulan I sebanyak 1 program (16,7%), untuk kegiatan dari 9 kegiatan sudah tercapai target sampai dengan triwulan I sebanyak 1 kegiatan (11%) dan untuk sub kegiatan dari 19 sub kegiatan sudah tercapai target sampai dengan triwulan I sebanyak 9 sub kegiatan (47,4%), dengan pagu dana sebesar Rp.19.793.937.440,00 realisasi keuangan mencapai Rp.3.467.104.521,00 (17,52%),

Terkait faktor penghambat di dalam pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sampai dengan triwulan I Tahun 2025 yaitu rata-rata yang belum mencapai target adalah program, kegiatan dan sub kegiatan yang memang pengukuran target kinerjanya dilakukan sampai akhir tahun anggaran sehingga target belum tercapai pada triwulan I.

Berdasarkan permasalahan tersebut, upaya yang perlu dilakukan pada triwulan-triwulan berikutnya yaitu salah satunya melakukan konsolidasi percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan untuk menghasilkan output yang berkualitas.

Tabel 2.1
Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4			5		6		7	8
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				19,793,937,440		3,467,104,521			DPMPTSP
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	79	nilai	18,575,024,900	0	3,274,358,553	0	17.63	DPMPTSP
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	40	dokumen	15,130,595,620	0	2,711,577,160	0	17.92	DPMPTSP
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	105	Orang/ Bulan	15,130,595,620	58	2,711,577,160	55.24	17.92	DPMPTSP
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100	persen	388,864,400	40	46,779,300	40	12.03	DPMPTSP

2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	paket	5,073,400	1	4,131,000	100	81.42	DPMPTSP
2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	paket	73,134,300	1	0	100	0	DPMPTSP
2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3	paket	70,000,000	1	6,750,000	33.33	9.64	DPMPTSP
2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	paket	24,133,700	1	8,491,280	100	35.18	DPMPTSP
2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2	Laporan	216,523,000	2	27,407,020	100	12.66	DPMPTSP
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1	dokumen	1,475,820,930	1	301,963,083	100	20.46	DPMPTSP
2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	Laporan	3,846,500	1	2,450,000	100	63.69	DPMPTSP
2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	2	Laporan	152,000,000	2	35,290,197	100	23.22	DPMPTSP

2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	Laporan	1,319,974,430	1	264,222,886	100	20.02	DPMPTSP
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	20	Unit	1,579,743,950	12	214,039,010	60	13.55	DPMPTSP
2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20	unit	1,336,436,050	7	214,039,010	35	16.02	DPMPTSP
2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10	unit	243,307,900	5	0	50	0	DPMPTSP
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)	12,650	proyek	189,266,230	0	22,533,246	0	11.91	DPMPTSP
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah kajian peta potensi dan peluang investasi berbasis jenis usaha	2	dokumen	189,266,230	0	22,533,246	0	11.91	DPMPTSP
2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah dokumen peta potensi investasi Provinsi	2	dokumen	189,266,230	0	22,533,246	0	11.91	DPMPTSP

	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	33.5	persen	136,193,520	8	17,902,164	23.88	13.14	DPMPTSP
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen publikasi promosi penanaman modal	2	dokumen	136,193,520	0	17,902,164	0	13.14	DPMPTSP
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Provinsi	1	dokumen	136,193,520	0	17,902,164	0	13.14	DPMPTSP
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase perizinan dan non perizinan yang diselesaikan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku	100	persen	640,175,740	40	114,755,148	40	17.93	DPMPTSP
	2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis izin dan non izin yang terbit sesuai kewenangan Provinsi	100	persen	640,175,740	40	114,755,148	40	17.93	DPMPTSP

2.18.04.1.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	400	pelaku usaha	498,754,100	744	84,710,820	100	16.98	DPMPTSP
2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	10	pelaku usaha	141,421,640	57	30,044,328	100	21.24	DPMPTSP
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai investasi	12.3	Triliun	182,326,230	0	22,533,246	0	12.36	DPMPTSP
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase peningkatan pemenuhan komitmen penanaman modal	92	persen	182,326,230	0	22,533,246	0	12.36	DPMPTSP
2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan	18	kegiatan usaha	17,280,000	0	0	0	0	DPMPTSP

			inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha								
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	13	kegiatan usaha	126,146,230	0	22,533,246	0	17.86	DPMPTSP
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	40	pelaku usaha	38,900,000	0	0	0	0	DPMPTSP
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase data informasi penanaman modal yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100	persen	70,950,820	100	15,022,164	100	21.17	DPMPTSP

	2.18.06.1.01	Urusan Pengelola Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	2	dokumen	70,950,820	0	15,022,164	0	21.17	DPMPTSP
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	2	dokumen	70,950,820	0	15,022,164	0	21.17	DPMPTSP

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berku rang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								17,755,928,560.00	20,171,142,940.00	19,793,937,440.00	2,038,008,880.00						22,161,696,700.00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							17,755,928,560.00	20,171,142,940.00	19,793,937,440.00	2,038,008,880.00							22,161,696,700.00
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							17,755,928,560.00	20,171,142,940.00	19,793,937,440.00	2,038,008,880.00							22,161,696,700.00
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				79 Nilai	79 Nilai	16,186,129,199.00	18,687,270,400.00	18,575,024,900.00	3,275,567,501.00							19,461,696,700.00
	2.18.01.1.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan				40 dokumen	40 dokum en	13,575,703,875.00	15,130,595,620.00	15,130,595,620.00	1,554,891,745.00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		14,000,000,000.00
	2.18.01.1.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				67 Orang/ Bulan	105 Orang/ Bulan	13,575,703,875.00	15,130,595,620.00	15,130,595,620.00	1,554,891,745.00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			14,000,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berku rang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.18.01.1.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	517,692,644.00	501,109,900.00	388,864,400.00	-128,828,244.00				Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		402,696,700.00
	2.18.01.1.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,599,100.00	5,073,400.00	5,073,400.00	-7,525,700.00	Kota Denpasar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			25,000,000.00
	2.18.01.1.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	72,473,244.00	0.00	0.00	-72,473,244.00	Kota Denpasar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0.00
	2.18.01.1.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	0.00	73,134,300.00	73,134,300.00	73,134,300.00	Kota Denpasar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			72,471,700.00
	2.18.01.1.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	80,000,000.00	0.00	0.00	-80,000,000.00	Kota Denpasar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0.00
	2.18.01.1.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					3 Paket	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	Kota Denpasar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			80,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL		DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.18.01.1.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,225,300.00	0.00	0.00	-25,225,300.00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0.00
	2.18.01.1.06 .0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	0.00	25,516,200.00	24,133,700.00	24,133,700.00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			25,225,000.00
	2.18.01.1.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 laporan	327,395,000.00	327,386,000.00	216,523,000.00	-110,872,000.00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			200,000,000.00
	2.18.01.1.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 dokumen	1 dokumen	1,481,471,980.00	1,475,820,930.00	1,475,820,930.00	-5,651,050.00				Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1,659,000,000.00
	2.18.01.1.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 laporan	2,464,900.00	3,846,500.00	3,846,500.00	1,381,600.00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5,000,000.00
	2.18.01.1.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 laporan	160,000,000.00	152,000,000.00	152,000,000.00	-8,000,000.00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			154,000,000.00
	2.18.01.1.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1,319,007,080.00	1,319,974,430.00	1,319,974,430.00	967,350.00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1,500,000,000.00
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara				20 unit	20 Unit	611,260,700.00	1,579,743,950.00	1,579,743,950.00	968,483,250.00				Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		3,400,000,000.00
	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	549,440,700.00	1,336,436,050.00	1,336,436,050.00	786,995,350.00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2,500,000,000.00
	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	61,820,000.00	243,307,900.00	243,307,900.00	181,487,900.00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			900,000,000.00
1.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/PMA)				12.650 proyek	12.650 Proyek	259,998,420.00	215,186,230.00	189,266,230.00	140,001,580.00							400,000,000.00
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Kajian Peta Potensi dan Peluang Investasi Berbasis Jenis Usaha				2 dokumen	2 Dokumen	259,998,420.00	215,186,230.00	189,266,230.00	-70,732,190.00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor		400,000,000.00
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	259,998,420.00	215,186,230.00	189,266,230.00	-70,732,190.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			400,000,000.00
2.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi Investor Yang Mengajukan Permohonan Penanaman Modal di Provinsi Bali				33.5 persen	33.5 Persen	277,600,560.00	151,553,520.00	136,193,520.00	122,399,440.00							400,000,000.00
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Publikasi Promosi Penanaman Modal				2 dokumen	1 Dokumen	277,600,560.00	151,553,520.00	136,193,520.00	-141,407,040.00				Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor		400,000,000.00
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi																	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	277,600,560.00	151,553,520.00	136,193,520.00	-141,407,040.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			400,000,000.00
3.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku				100 persen	100 persen	609,629,960.00	818,735,740.00	640,175,740.00	490,370,040.00							1,100,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Izin dan Non Izin yang Terbit sesuai Kewenangan Provinsi				100 persen	100 persen	609,629,960.00	818,735,740.00	640,175,740.00	30,545,780.00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor		1,100,000,000.00
	2.18.04.1.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				400 Pelaku Usaha	400 Pelaku Usaha	456,021,400.00	667,234,100.00	498,754,100.00	42,732,700.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			900,000,000.00
	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko																	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	153,608,560.00	151,501,640.00	141,421,640.00	-12,186,920.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			200,000,000.00
4.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi				12.3 Triliun	12.3 Triliun	331,846,141.00	223,606,230.00	182,326,230.00	268,153,859.00							600,000,000.00
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Penanaman Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Pemenuhan Komitmen Penanaman Modal				92 persen	92 Persen	331,846,141.00	223,606,230.00	182,326,230.00	-149,519,911.00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor		600,000,000.00
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				100 Kegiatan usaha	18 Kegiat an usaha	49,575,000.00	34,560,000.00	17,280,000.00	-32,295,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			300,000,000.00
	2.18.05.1.0 1.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																	
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				321 Kegiatan usaha	13 Kegiat an usaha	232,505,941.00	150,146,230.00	126,146,230.00	-106,359,711.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			200,000,000.00
	2.18.05.1.0 1.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				325 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	49,765,200.00	38,900,000.00	38,900,000.00	-10,865,200.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			100,000,000.00
5.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data Informasi Penanaman Modal yang Terpenuhi Sesuai Kebutuhan				100 persen	100 Persen	90,724,280.00	74,790,820.00	70,950,820.00	109,275,720.00							200,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berku rang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi				2 dokumen	2 Dokumen	90,724,280.00	74,790,820.00	70,950,820.00	-19,773,460.00				Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Masyara kat Pemoho n Izin dan Non Izin, Investor		200,000,000.00
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																	
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				2 Dokume n	2 Dokum en	90,724,280.00	74,790,820.00	70,950,820.00	-19,773,460.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			200,000,000.00

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2025 bertujuan mensinkronisasikan program dan kegiatan dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sesuai dengan kondisi dan dinamika saat ini.

Faktor penghambat di dalam pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan I yaitu rata-rata yang belum mencapai target adalah program, kegiatan dan sub kegiatan yang memang pengukuran target kinerjanya dilakukan sampai akhir tahun anggaran, sehingga target belum tercapai pada triwulan I.

Adapun upaya yang perlu dilakukan pada triwulan-triwulan berikutnya yaitu salah satunya melakukan konsolidasi percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan untuk menghasilkan output yang berkualitas.

Demikian, semoga dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2025.